



Paradiplomasi pemerintah Kota Jakarta pada C40 Cities Climate Leadership Group 2018-2020

Audi Zulfa Sholihan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

audizul.s@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
21 Desember 2024
Disetujui :
13 Januari 2025
Dipublikasikan :
30 Januari 2025

ABSTRAK

Paradiplomasi Pemerintah Kota Jakarta dalam C40 Cities Climate Leadership Group pada 2018-2019 berfokus pada kolaborasi internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Ini mencakup adopsi teknologi hijau dan penguatan kapasitas lokal untuk mendukung tujuan keberlanjutan. Paradiplomasi melalui C40 memberikan Jakarta kesempatan untuk berperan aktif dalam agenda global terkait perubahan iklim, sekaligus memperkuat upaya lokal dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Paradiplomasi Pemerintah Kota Jakarta pada C40 Cities Climate Leadership Group untuk kurun waktu 2018-2019. Data dikumpulkan melalui wawancara dan literatur sebagai sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan konsep Paradiplomasi dan Multi-Level Governance. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Paradiplomasi Pemerintah Kota Jakarta pada C40 melalui kerjasama dalam beberapa proyek, legalisasi komitmen, menjadi tuan rumah pertemuan inisiasi program Climate Action Plan di Asia Tenggara, penandatanganan deklarasi, dan Jakarta sebagai Steering Committee. Dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi Jakarta dalam C40 Cities Climate Leadership Group merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung upaya lokal dalam keberlanjutan, tetapi juga memperkuat posisi Jakarta di panggung global sebagai kota yang berkomitmen untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

Kata kunci: Paradiplomasi, Lingkungan, Perubahan iklim, Jakarta, C40

ABSTRACT

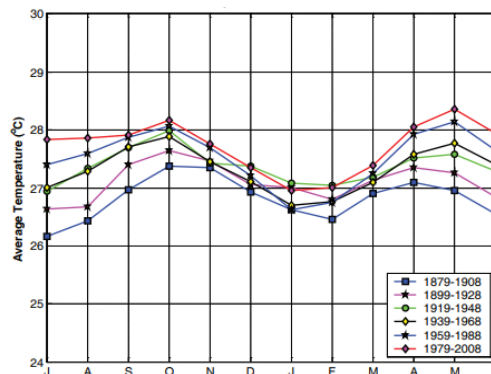
The Paradiplomacy of the Jakarta City Government in the C40 Cities Climate Leadership Group in 2018-2019 focused on international collaboration to address climate change. This includes the adoption of green technology and strengthening local capacity to support sustainability goals. Paradiplomacy through C40 provides Jakarta with the opportunity to play an active role in the global agenda related to climate change, while strengthening local efforts in creating a more sustainable and resilient city. This study aims to determine the Paradiplomacy of the Jakarta City Government in the C40 Cities Climate Leadership Group for the period 2018-2019. Data were collected through interviews and literature as primary and secondary data sources. This study uses the concept of Paradiplomacy and Multi-Level Governance. The results of this study explain the Paradiplomacy of the Jakarta City Government in C40 through cooperation in several projects, legalization of commitments, hosting the initiation meeting of the Climate Action Plan program in Southeast Asia, signing the declaration, and Jakarta as the Steering Committee. It can be concluded that Jakarta's paradiplomacy in the C40 Cities Climate Leadership Group is a strategic step that not only supports local efforts in sustainability, but also strengthens Jakarta's position on the global stage as a city committed to facing the challenges of climate change.

Keywords : Paradiplomacy, Environment, Climate Change, Jakarta, C40



PENDAHULUAN

Jakarta memiliki ambisi dalam pengurangan karbon sebanyak 50% pada 2030. Melihat tren iklim di Jakarta, dapat dilihat melalui perubahan nilai rata-rata temperature tahunan dan bulanan selama beberapa dekade.



Gambar 1. Grafik Gabungan Suhu 30 Tahun Jakarta Untuk Setiap Bulan (Juli ke Juni

Sumber: Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCR), Scientific Basis: Analysis and Projection of Temperature and Rainfall, 2010

Perubahan nilai suhu rata-rata 30 tahun bulanan, terlihat terjadinya perubahan suhu yang cukup signifikan antara pada bulan-bulan musim kemarau (Juni-Juli-Agustus) yang mencapai 1,50C dan musim hujan (Desember-Januari-Februari) yang hanya 0,50C selama abad ke-20. Tren kenaikan suhu di Jakarta pada musim kemarau mayoritas yang berulang dipengaruhi oleh Urban Heat. Efek ini sebagian besar dihasilkan oleh berbagai faktor yang sering muncul di kota-kota besar dunia, seperti limbah panas dari kegiatan industri yang massif, kegiatan transportasi dan rumah tangga yang kurang ramah lingkungan, kurangnya lahan hijau, dan lain-lain (Shinta, 2024).

Melalui data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa capaian reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Jakarta selama 2013-2017 (lima tahun sebelum kurun waktu penelitian yaitu 2018-2020) mengalami stagnansi. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2015, namun turun kembali pada tahun berikutnya bahkan tidak lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, Kota Jakarta memiliki permasalahan polusi yang cukup serius. Pada tahun 2019, konsentrasi PM 2.5 Jakarta rata-rata tahunan sebesar 49,4 g/m³, angka ini akan memasukkannya ke dalam kelompok 'tidak sehat untuk kelompok sensitif' (antara 35,5 hingga 55,4 g/m³), dan memiliki efek kesehatan negatif langsung pada demografi populasi tertentu, dengan anak-anak kecil, orang tua dan mereka yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk atau kondisi yang sudah ada sebelumnya menjadi yang paling rentan dan terparah dalam jangka waktu yang lama (Hutabarat, 2017). Angka tertinggi pada tahun 2019 tercatat sebesar 67,2 g/m³, menempatkan kualitas udara bulan itu ke dalam kelompok "tidak sehat" (55,5 hingga 150,4 g/m³ untuk digolongkan seperti itu).

Tabel 1. Tabel Capaian Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kurun Waktu 2013-2017

Tahun	Capaian Reduksi Emisi GRK Periode
	2013-2017 Sektor Energi (CO ₂ e)
2013	8.351.583
2014	8.306.224
2015	9.138.257
2016	8.267.584
2017	8.049.992

Sumber: Pelaporan Penurunan Emisi gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta, DLH DKI Jakarta, 2019

Keadaan seperti ini menempatkan Kota Jakarta di peringkat 126 dari semua peringkat kota paling tercemar di dunia. Sumber-sumber seperti kendaraan, emisi pabrik dan pembakaran terbuka bahan organik semuanya memainkan peran besar. Jika terpapar dalam jangka panjang, PM 2.5 dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut terutama bagi anak-anak, hingga kanker paru-paru. Selain itu, PM 2.5 dapat meningkatkan kadar racun dalam pembuluh darah yang dapat memicu stroke,

penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung lainnya, serta dapat membahayakan ibu hamil karena berpotensi menyerang janin (Greenpeace Indonesia).

Jakarta adalah ibukota negara Indonesia dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pendapatan wilayah tertinggi di Indonesia dengan permasalahan lingkungan dan iklim Kota Jakarta, mulai dari tingkat polusi yang tinggi dan khususnya mengenai stagnansi nya penurunan emisi GRK kota selama lima tahun sebelum kurun waktu penelitian, capaian penurunan emisi GRK Kota Jakarta tidak meningkat secara signifikan dan harapan pengurangan 50% karbon pada 2030 patut dipertanyakan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Kota Jakarta dalam merespon permasalahan iklim belum optimal. Jakarta telah bergabung dalam jaringan C40 Cities Climate Leadership Group sejak 2006 dengan harapan dan tujuan untuk mengurangi karbon sebanyak 50% pada 2030, melalui *sharing peer to peer* diantara anggota C40 untuk mengadopsi kebijakan penanganan iklim. Tujuan penelitian ini melihat upaya Pemerintah Kota Jakarta pada C40 pada kurun waktu 2018-2020 dalam menanggapi permasalahan lingkungan dan perubahan iklim kota.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual Paradiplomasi dan Multi Level Governance sebagai media analisis dalam penelitian. Konsep Paradiplomasi digunakan untuk melihat fenomena keterlibatan aktor subnasional (provinsi, kota) di kancah politik internasional baik skala regional maupun global membawa kepentingan kolektif pada berbagai bidang isu, dengan maupun tanpa koordinasi pemerintah pusat.

Andre Lecours (Sirsya, 2024) mengenalkan konsep *Layers of Paradiplomacy* yang terdiri atas tiga konsep hubungan sub state di kancah internasional. Yang pertama hubungan dan kerja sama pemerintah sub state yang hanya berorientasi hanya untuk tujuan ekonomi seperti perluasan pasar, pengembangan dan timbal balik investasi, yang tidak melibatkan motif politik dan budaya. Yang kedua melibatkan multi purposes, antara ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, alih teknologi, dll. Hubungan ini mengacu pada *decentralized cooperation*. Yang ketiga paradiplomasi yang melibatkan motif politik dan identitas yang spesifik dan kompleks.

Menyinggung tujuan Paradiplomasi subnasional, Cohn dan Smith dalam (Dermawan et al., 2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah menjadi aktor perantara (mediating actors) maupun sebagai aktor utama (primary actors). Cornago mendefinisikan Paradiplomasi sebagai keterlibatan pemerintah subnegara bagian dalam hubungan internasional, melalui pembentukan kontak formal dan informal, dengan entitas publik atau swasta asing, dengan tujuan untuk mempromosikan masalah sosial-ekonomi, budaya atau politik, serta setiap dimensi asing lain dari kompetensi konstitusional mereka sendiri (Nisa, 2022). Dalam berbagai literatur dan penelitian mengenai aksi pemerintah daerah dalam mitigasi dan perubahan iklim melalui kerangka internasional, banyak menggunakan konsep Multi Level Governance (MLG), untuk melihat interaksi lintas yuridiksi yang dilakukan pemerintah daerah

Secara empiris, pendekatan MLG telah digunakan untuk menguji implikasi interaksi transnasional di antara kota-kota dunia (Hakiky, 2023). MLG adalah pendekatan dengan konsep normatif untuk mengalokasikan otoritas pemerintahan, menempatkan perhatiannya lebih besar kepada pemerintah daerah (kota), berawal dari munculnya keterlibatan aktor-aktor subnasional diantara negara anggota kerangka EU pada tahun 1990-an, khususnya dalam menanggapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Tata kelola multi-level (MLG) telah menjadi pendekatan arus utama untuk menjelaskan, menetapkan, dan mengimplementasikan aksi perubahan iklim dengan mengacu pada mekanisme yang melibatkan konektivitas antar bidang pemerintahan (Rosyidah, 2017).

Pendekatan MLG menawarkan kerangka kerja yang sangat cocok untuk menganalisis proses multi-skala dan multi-aktor yang diamati dalam tata kelola iklim, serta memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kehadiran berbagai tingkatan pemerintah memengaruhi kinerja kebijakan lingkungan (Wälti, 2010). Dalam keberlanjutan lingkungan menjadi sangat penting, bahwa erubahan pembangunan memerlukan adanya peran dan partisipasi aktif pemuda yang memiliki mobilitas tinggi, dan gaya hidup sebagai citra penciptaan lingkungan yang sehat (Suyatna & Nurhasanah, 2017).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fathun (2022), menyatakan bahwa dengan diplomasi kota, mampu menjadi sarana berbagi pengalaman antarkota di dunia untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan strategis di tingkat kota. Selain itu, Jakarta dapat berperan sebagai tempat tinggal yang aman, nyaman melalui sejumlah kebijakan strategis, khususnya di bidang lingkungan hidup. Peran paradiplomasi melalui diplomasi kota ini merupakan bentuk motivasi, strategi, tingkat kolaborasi dan tingkat keterlibatan untuk membantu pemerintah pusat dalam memecahkan permasalahan dunia yang

semakin kompleks. Pada penelitian Fathun (2016), peran pemerintah daerah tidak hanya menjadi aktor lokal tetapi juga aktor internasional yang dikenal dengan istilah 'paradiplomasi'. Contoh paradiplomasi dalam hubungan internasional adalah menggagas kerja sama penanaman modal asing untuk menarik minat investor asing. Makassar merupakan salah satu kota yang telah menerapkan paradiplomasi untuk mewujudkan kota cerdas (smart city) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bercirikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian lainnya menyatakan bahwa paradigma Kota Bandung dalam bentuk sister city dengan mitra kotanya telah menghasilkan beberapa manfaat sekaligus peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota sekaligus turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya dalam mengembangkan diplomasi Indonesia (Alam & Sudirman, 2020). Penelitian sebelumnya sama membahas berkaitan dengan paradiplomasi pemerintah kota, kebaruan penelitian ini adalah membahasnya pada c40 cities climate leadership group 2018-2020.

Dalam penelitian ini, penggunaan konsep MLG dianggap dapat menjadi media analisis yang tepat dalam melihat keterlibatan subnasional dalam proses pembuatan kebijakan dan program penanganan lingkungan dan perubahan iklim, khususnya bagi pemerintah Kota Jakarta pada C40 Cities Climate Leadership Group. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Paradiplomasi Pemerintah Kota Jakarta pada C40 Cities Climate Leadership Group untuk kurun waktu 2018-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai studi lapangan dan juga dokumentasi sebagai studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Penulis mewawancarai beberapa tokoh ahli dalam bidang Paradiplomasi Kota Jakarta yaitu kepala bagian kerjasama luar negeri dan kepala sub-bagian kerjasama organisasi luar negeri Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda DKI Jakarta, kepala bidang tata lingkungan dan kebersihan dan seksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, juga Board C40 untuk Kota Jakarta, untuk mengetahui bagaimana pandangannya mengenai Paradiplomasi Kota Jakarta di C40 Cities Climate Leadership Group. Penelitian ini juga didukung dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, serta laporan atau *press release* yang dikeluarkan oleh C40, dan berbagai bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak bergabung nya Kota Jakarta dengan C40 pada 2007, C40 telah aktif memberikan dan memfasilitasi Kota Jakarta dalam aksi mitigasi dan perubahan iklim. Aksi iklim sebelum tahun 2018 diantaranya terdapat program dan konsep Green Building pada tahun 2012, dimana Kota Jakarta melalui Pergub no 38 berkomitmen dalam mereduksi air dan konsumsi energy selaras dengan komitmen reduksi emisi GRK sebesar 30% di 203 (AISA). Dalam program ini, C40 berkontribusi dalam bantuan berupa technical support berupa city adviser dan roadmap terhadap Green Building.

Selain itu, pemerintah Kota Jakarta juga aktif dalam melakukan komunikasi publik, dan terlibat dalam pertemuan internasional melalui kerangka C40. Seperti pada C40 Mayors Summit dan Mayors Forum World Cities Summit ditahun 2016, Pemerintah Kota menjadi pembicara dalam beberapa sesi diskusi. Selain itu, Jakarta juga aktif berpartisipasi untuk turut serta dalam sistem pembelajaran antarkota. Jakarta telah berperan dalam membagikan *best practice* diantara kota-kota lainnya dalam aksi penanggulangan perubahan iklim, dalam dokumen *C40 Good Practice Guides* yang didalamnya berisikan *Socially Inclusive Climate Adaptation for Urban Revitalization Project* dan *Coastal Defence Strategy and Flood Mapping* (C40, 2016), dan pada dokumen *Cities100* yang didalamnya memuat *Low-cost Housing Protects People and Land* dan *Alleviating Floods with Parks for Children* (C40, 2015).

Menurut hasil wawancara dari beberapa pihak, didapatkan bahwa kerjasama luar negeri pemerintah kota Jakarta dengan C40 tidak lepas dari kepemimpinan Fauzi Bowo, yang pada saat itu juga aktif melibatkan kota Jakarta pada berbagai organisasi internasional. Selain itu, *City Adviser* C40 Jakarta juga memiliki peranan yang cukup besar terhadap kinerja kerjasama yang terjalin. Menurut penuturan Susi, *City Adviser* ditahun 2018 memiliki rekam jejak yang sangat baik bila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Peneliti juga melihat, bahwa tinggi nya tingkat kerjasama yang terjalin dengan C40 di tahun 2018-2020 adalah kesiapan Jakarta itu sendiri untuk melakukan perubahan, seperti

kondisi sosial & ekonomi yang baik, dinamika politik yang cenderung stabil, juga infrastruktur yang mempunyai. Hal ini tentu mempengaruhi mata internasional dalam hal ini *international city networking* untuk bekerjasama dengan Jakarta yang memiliki peluang yang *prestigious*.

Peneliti menilai bahwa Pemerintah Kota Jakarta berupaya melakukan berbagai kerjasama dengan C40 dalam kurun waktu 2018-2020. Sejalan dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2016 lalu, *Jakarta Climate Action Plan (CAP)* adalah dokumen strategis yang menetapkan basis bukti untuk mengembangkan target iklim spesifik Jakarta beserta aksi strategis dan implementasinya dalam jangka pendek (2020–2022), jangka menengah (2022–2030) dan jangka panjang (2030–2050) (Ulum, 2023).

Penyusunan Jakarta CAP ini didasari oleh program C40 yaitu *Deadline 2020 CAP* yang mengharuskan seluruh kota anggota C40 dapat merumuskan dan memiliki dokumen CAP pada 2020 yang kompatibel, dimana pada 1 Agustus 2018, Gubernur Anies Baswedan telah menandatangani *Letter of Jakarta Climate Action Plan Deadline 2020*. Pada proses awalnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal kepada C40 yang selanjutnya ditanggapi dan di “review” agar kompatibel dengan aturan pusat (nasional) dan global (Paris Agreement) oleh pihak C40 untuk selanjutnya diberikan persetujuan dukungan melalui *financial support*, *technical support*, dan lain-lain terhadap proses penyusunan Jakarta CAP (Natswa, 2021).

Kota Jakarta berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK minimal 49% dari skenario *business-as-usual* sebesar 106,5 MtCO₂e pada tahun 2030 dan pengurangan emisi GRK sebesar 62% dari skenario *business-as-usual* sebesar 189,5 MtCO₂e pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun dasar 2016.

Pemerintah Jakarta merumuskan tujuan dan sasaran pada pembangunan dan industri, transportasi, dan limbah padat, dengan mengidentifikasi 48 aksi iklim berdasarkan risiko iklim dan profil emisi gas rumah kaca (GRK), serta aksi iklim yang telah dilaksanakan atau direncanakan. Dari jumlah tersebut, didalam *Jakarta Climate Action Plan* terdapat 14 aksi strategis yang memiliki dampak terbesar dan/atau kepentingan strategis, seperti perluasan jaringan transportasi umum, pembangunan hijau dan energi terbarukan, konstruksi dan perlindungan pantai alami dan buatan manusia, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Hal ini menjadi pedoman utama Jakarta untuk melakukan aksi iklim sampai dengan tahun 2025.

Dalam penyusunan Jakarta CAP, C40 memberikan dukungan berupa *City Adviser* untuk mendampingi Jakarta dalam penyusunan terkait kolaborasi dan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mengumpulkan data dan masukan untuk aksi penanganan iklim diberbagai bidang (Hafizha et al., 2024). Selain itu, C40 juga memberikan support melalui Tim Konsultan (ada juga dari pihak swasta) untuk mendukung *scientific reason*, riset dan kajian dalam penyusunan CAP. Dalam prosesnya, dilakukan *pre-assesment* dan *self-assesment* terhadap SKPD terkait baik melalui isian detail maupun diskusi dan workshop secara daring maupun luring (Pradono, 2015). Dalam hal ini, penyusunan CAP melibatkan empat puluh stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan CAP baik dari berbagai instansi pemerintahan daerah maupun pusat diberbagai bidang, pihak swasta, dan kemitraan internasional (selain C40, IGES, UCLG ASPAC, ICLEI, dan WRI juga terlibat dalam penyusunan Jakarta CAP) (Kurniawan et al., 2023).

City Adviser dan Tim Konsultan dibiayai C40 yang berasal dari mitra pendanaan yang ada, karena kota anggota C40 tidak memiliki biaya keanggotaan (income), maka C40 secara proaktif memiliki dan/atau mencari donor untuk program-programnya bersama kota anggota. Dalam penyusunan Jakarta CAP, pendanaan diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark sebagai donor utama (termasuk mitra donor C40) dan Pemerintah UK. Bantuan tidak hanya berupa pendanaan, namun juga berupa dokumen dan format CAP *Framework* untuk memandu Jakarta dalam penyusunan CAP (Pasaribu et al., 2023).

Selain CAP, sejalan dengan komitmen *Deadline 2020*, C40 meluncurkan *small grants programme* atau dinamakan program *Empowering Cities With Data (ECWD)* yang bertujuan untuk menjabatani permasalahan data terkait perubahan iklim kota. C40 mendapatkan dukungan pendanaan dari CIFF sebesar USD 500.000 untuk 8-10 kota terpilih atau sekitar USD 50.000 untuk setiap kota sebagai kelompok percontohan guna mengatasi tantangan data kota (C40, 2021). Melalui program ini, kota mendapat dukungan untuk membangun kapasitas teknis untuk proses manajemen data, termasuk pengumpulan data, analisis, pemantauan dan penyebaran data, dan memungkinkan kota-kota tersebut

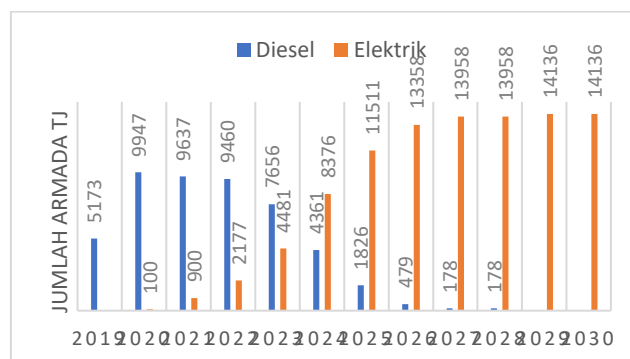
mengumpulkan data iklim baru tentang produksi dan konsumsi energi, transportasi, limbah, dan kualitas udara.

Pemerintah Jakarta mengajukan proposal pada C40 untuk ECWD dengan fokus dalam pembuatan platform data berbasis web yang dapat menerima, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara *real-time*. Pada tanggal 31 Januari 2019, C40 menyatakan Jakarta terpilih untuk mendapatkan dukungan *small grants programme* melalui ECWD dari *Children's Investment Fund Foundation* (CIFF) untuk penyempurnaan pengumpulan data terkait perubahan iklim. Kota Jakarta menjadi salah satu dari sembilan kota terpilih, dari dua puluh empat kota yang berpartisipasi pada program ECWD. Pemerintah Kota Jakarta memperoleh dana hibah sebesar USD 50.000 dan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan teknis untuk membuat platform data iklim. *Memorandum Agreement* sudah ditandatangani dan masih dalam proses tindak lanjut dari C40. Program ECWD akan membantu Pemerintah Kota Jakarta menyiapkan sistem pelaporan data aktifitas daring untuk menginventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai dasar penyusunan CAP dan komitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 50% pada 2030 (Juniarty et al., 2024). Peneliti menilai, ECWD dengan bantuan hibah C40 dapat mendorong dan mengoptimalkan upaya Pemerintah Kota Jakarta untuk memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim dengan sistem data iklim yang terkoneksi.

Transportasi menjadi sumber utama penghasil polusi terbesar di Kota Jakarta. Bersama C40, Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah kota Jakarta telah melakukan proyek bertajuk “Zero Emission Buses in Jakarta” yang dilaksanakan selama periode 13 bulan mulai Februari 2020, dengan dukungan dari *C40 Cities Finance Facility* (CFF). *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk Uji Coba Bus Listrik telah ditandatangani oleh C40, GIZ, dan PT. Transportasi Jakarta pada Februari 2020 (C40 CFF, 2021).

Kota Jakarta adalah rumah bagi sistem bus umum terbesar di dunia dengan perharinya sebanyak 800.000 komuter menggunakan TransJakarta *Bus Rapid Transit* (BRT). Sebagai sistem BRT pertama di Asia Tenggara yang diluncurkan pada tahun 2004, saat ini menjadi yang terpanjang di dunia, mencakup lebih dari 244 kilometer (C40 CFF, 2021). Keberhasilan sistem BRT dalam efisiensi dan integrasi. Pemerintah Kota Jakarta melalui TransJakarta ingin mengganti semua bus berbahan bakar fosil dengan *E-Bus* pada 2030.

Seperti program-program lainnya, C40 memberikan dukungan berupa penugasan *City adviser* untuk proyek, khususnya dalam proses dokumen kontrak TJ dan operator, juga koordansi kerjasama dengan GIZI. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi sebesar 2.062 tCO₂e/tahun untuk tahun 2021 (asumsi tahun inisiasi) dan 3.518 tCO₂e/tahun untuk tahun terakhir proyek 2050, dengan rata-rata 3.349 tCO₂e/tahun selama 30 tahun. Penurunan emisi tersebut relatif kecil dibandingkan dengan emisi Kota Jakarta (53,5 Mt/tahun). Hal ini dikarenakan skala proyek yang kecil karena hanya 100 bus yang akan diganti (C40, 2021). Namun jika jaringan listrik dihasilkan dari 100% energi terbarukan maka emisi proyek akan menjadi nol.



Gambar 2. Estimasi Proyeksi Elektrifikasi TransJakarta

Sumber: Biro KDH KLN DKI Jakarta

Tabel 2. Proyeksi Reduksi Emisi GRK

Indicator	Metrik	Penjelasan	Hasil
Ton karbon dioksida yang diharapkan untuk dikurangi atau dihindari	Tahunan	Reduksi Emisi GRK Pertahun - tahun 2021	2,062 tCO₂e/tahun
		Reduksi Emisi GRK Pertahun - tahun 2050	3,518 tCO₂e/tahun
		Reduksi Emisi GRK Pertahun - tahun 2021-2050	3,349 tCO₂e/tahun
	Kumulatif	Kumulatif Reduksi Emisi GRK Pertahun selama masa proyek	100,461 tCO₂e

Sumber: *Biro KDH KLN DKI Jakarta*

Peneliti melihat bahwa aksi iklim yang dilakukan oleh otonom daerah dinilai lebih efektif dan solutif terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. Melalui proyek elektrifikasi transportasi khususnya bus, Pemerintah Kota Jakarta melalui jaringan C40 dapat mempromosikan dan membagikan pengalaman dan ilmunya dalam proses proyek melalui terbitnya beberapa laporan dan artikel antara lain, *Technical Feasibility Study Report – Jakarta, 100 E-bus Trial - Jakarta Business Case.*, *TransJakarta (2020) TransJakarta's Electrification Strategy* dan *Zero-emission bus charging systems: Insights from Jakarta (C40, 2020)*.

Tidak hanya berupaya melakukan kerjasama dengan kemitraan C40, peneliti melihat berbagai upaya Pemerintah Kota Jakarta sebagai actor utama dalam meningkatkan komitmen iklimnya. Pada tahun 2019, Kota Jakarta menandatangani dua deklarasi didalam jaringan C40. *C40 Clear Air Declaration* ditandatangani Jakarta dan 34 kota lainnya pada 2019 lalu, berkomitmen untuk memberikan udara bersih bagi lebih dari 140 juta populasi yang tinggal di kota mereka. Melalui deklarasi ini, kota-kota berkomitmen pada visi bersama untuk memenuhi *Air Quality Guidelines 2030* dari *World Health Organization (WHO)* untuk mengurangi emisi lokal mereka, dan mengadvokasi pengurangan emisi regional, yang mengakibatkan penurunan tingkat polusi udara secara berkelanjutan. Melalui pedoman WHO dengan PM2.5 rata-rata tahunan 10 ug/m³, dan komitmen 35 kota didalam deklarasi, hal itu dapat menghindari 40.000 kematian setiap tahun (C40, 2019).

Dalam penandatanganan deklarasi ini, para kota termasuk Jakarta berjanji untuk, menetapkan tingkat dasar dan target pengurangan polusi udara yang ambisius yang memenuhi atau melampaui komitmen nasional dalam dua tahun, menetapkan kebijakan dan program substantif baru untuk mengatasi penyebab utama emisi polusi udara di kota sebelum 2025 dan membuat laporan kemajuan pengurangan tingkat polusi realtif terhadap target setiap tahunnya. Tidak hanya itu, para kota juga perlu untuk mengadvokasi pemerintah regional, negara bagian, supranasional, dan nasional untuk mengambil tindakan terhadap aksi iklim berkelanjutan (C40, 2019).

Di tahun yang sama, Kota Jakarta juga menandatangani *C40 Green & Healthy Streets Declaration*. Dalam deklarasi ini, sebanyak 34 kota (termasuk Jakarta) menyatakan niat mereka untuk mengubah area utama kota menjadi tempat dari kendaraan bebas emisi dengan menciptakan dan meningkatkan ruang publik, taman kota dan jalan, mengembangkan transportasi umum, infrastruktur sepeda, dan mengadopsi bus tanpa emisi secara eksklusif (C40, 2019). Amsterdam, Austin, Berlin, Jakarta, dan Liverpool adalah lima kota baru yang tergabung dalam deklarasi ini.

Selama tahun 2018 sampai dengan 2020, ditunjukan melalui pembuatan berbagai produk hukum. Diantaranya Pergub 1107/2019, yang mana Pengendalian Pencemaran Udara dan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim masuk dalam daftar Kegiatan Strategis Daerah, yang menunjukkan bahwa aksi iklim sebagai prioritas dalam rencana dan penganggaran pembangunan. Selain itu Pemerintah Kota Jakarta juga mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) no 1 Tahun 2018 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Pemerintah Kota Jakarta juga membentuk Tim MABI (Mitigasi, Adaptasi dan Bencana Iklim) melalui keputusan gubernur no 96 thn 2020 mengani Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim, dengan 4 POKJA (Kelompok Kerja) yaitu Mitigasi, Adaptasi, Penelitian, dan Kemitraan & Pendanaan. Dalam mengelola sistem dan aturan kendaraan bermotor kota, Pemerintah membuat Pergub (Peraturan Gubernur) no 66 tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang berisikan

kewajiban, tempat uji emisi, aturan dan informasi mengenai uji emisi, pemeriksaan, dan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat, teknis dan alat uji. Dalam pergub ini, menyatakan kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi dan/atau tidak melakukan uji emisi dikenakan disentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Pergub mengenai tarif layanan parkir.

Menanggapi peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, Gubernur Jakarta mengeluarkan Ingub (Instruksi Gubernur) 52 tahun 2020 mengenai Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Instruksi ini bertujuan untuk percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur. Pemerintah Jakarta juga berupaya untuk melakukan pendekatan multi sektor dalam percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara melalui dikeluarkannya Ingub no 66 tahun 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara. Hal ini bertujuan untuk mempeketat pengendalian sumber pencemaran udara, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat dan mengoptimalkan fungsi penghijauan sehingga memerlukan sinergitas antara Perangkat Daerah terkait.

Sebagai tindak lanjut pada Oktober 2021, DKI Jakarta mengeluarkan Pergub no 90 thn 2021 mengenai Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, yang didalamnya mengintegrasikan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sebelumnya belum diintegrasikan. Melalui Pergub ini, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki aturan resmi mengenai rendah karbon di Indonesia. Di dalam lampiran Pergub tersebut berisi lima sektor dan sebelas aksi untuk mitigasi, dan tujuh sektor dan sebelas aksi dalam adaptasi. Selain itu, secara ambisius, Kota Jakarta meningkatkan komitmennya dalam penurunan emisi GRK pada 2030 menjadi 50% dari sebelumnya 30%, dan pada tahun 2050 Kota Jakarta menjadi kota netral karbon/zero emission.

Dalam jaringan C40, tidak hanya melakukan kerjasama dengan mitra C40 dan meningkatkan komitmen iklim, dalam konteks yang sama Pemerintah Kota Jakarta juga berupaya untuk mempromosikan identitas kota yang peduli lingkungan dan iklim. Pada 18 Agustus 2019, Kota Jakarta menjadi tuan rumah dalam acara *C40 Southeast Asian Regional Academy* yang secara resmi mencanangkan C40 Climate Action Planning Program untuk Kawasan Asia Tenggara oleh lima kota besar dibawah naungan C40 (Hanoi, Ho Chi Minh, Jakarta, Kuala Lumpur and Quezon) (C40, 2019). Ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memenuhi Perjanjian Paris dalam melakukan aksi perubahan iklim. Program ini akan membangun kapasitas di kota-kota untuk mengembangkan rencana aksi iklim yang terintegrasi dan inklusif yang menjawab kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan memberikan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah Kota Jakarta melalui forum ini, memiliki kesempatan yang besar untuk berdialog, mempromosikan dan membagikan baik strategi, aksi maupun pencapaian pemerintah dalam memitigasi dan mengadaptasi permasalahan dan perubahan iklim kota, tidak hanya kepada lima kota diatas, namun juga kepada pandangan regional di Asia Tenggara maupun global sebagai bentuk Paradiplomasi. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, memaparkan tantangan yang dihadapi kota terkait masalah lingkungan, yang tentunya melalui forum ini dapat belanja ide dan berbagi praktik yang inklusif. Di antara tantangannya adalah peningkatan emisi GRK, polusi dari transportasi, penurunan tanah dan banjir dari tiga belas sungai yang mengalir di kota. Anies juga menggaris bawahi mengenai keselarasan antara ekonomi dengan ekologi, dengan menyoroti komitmen kebijakan dan fiskal untuk mendukung program lingkungan di Pemerintah Jakarta (C40, 2019).

Pada akhir tahun 2020, Desember, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Tokyo, Yuriko Koike sebagai wakil ketua dari C40 *Steering Committee* mewakili wilayah Asia Tenggara dan Oseania. Yuriko terpilih kembali sebagai wakil ketua sejak tahun 2016. Sebagai wakil ketua, Gubernur Yuriko dan Gubernur Anies akan mendukung walikota C40 dalam melakukan kerja sama untuk memberikan pemulihan yang hijau dan adil dari pandemi COVID dan mengatasi krisis iklim (C40, 2020). Secara global, Anies Baswedan sebagai Champion untuk *e-mobility* dalam berbagai agenda internasional yang berkaitan dengan transportasi publik dan elektrifikasi. Anies Baswedan memiliki proyek yang bernama "*The Future is Public Transport*" sebagai salah satu inisiatif global untuk pengembangan global kedepannya.

Peneliti menilai bahwa, penunjukan Jakarta ini menunjukkan kapabilitas dan kualitas pemerintah Jakarta terkait kepemimpinan maupun komitmen terhadap aksi mitigasi dan perubahan iklim kota, bahkan global. Penilaian ini juga relevan dengan terpilihnya Kota Jakarta sebagai pemenang *2021 Sustainable Transport Award* pada tahun 2020. Kota Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara

yang memenangkan penghargaan tersebut, melalui komitmen Kota Jakarta dalam pengelolaan transportasi publik yang ramah lingkungan melalui BRT terpanjang didunia, satu juta penumpang perhari nya, dan komitmen terhadap peningkatan dan ketahanan sistem angkutan.

KESIMPULAN

Merujuk pada rumusalan masalah penelitian yang ada yaitu “Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Jakarta dalam Melakukan Paradiplomasi pada C40 Cities Climate Leadership Group?”, hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Jakarta telah aktif melakukan Paradiplomasi pada C40 dalam kurun waktu 2018-2020, dan dinilai positif dan dapat menjawab tujuan Kota Jakarta untuk mereduksi GRK sebesar 50%, melalui kerjasama terdesentralisasi yang terdiri atas penyusunan Jakarta Climate Action Plan, *Empowering Cities With Data* dan Uji Coba Bus Listrik, menandatangani deklarasi internasional dan melegalkan komitmennya melalui produk hukum, dan juga melakukan promosi identitas. Saran akademis yang dapat diberikan diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya hendaknya dapat menjelaskan Paradiplomasi dari kota-kota lainnya terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai *best practice* dan dapat menjadi pembelajaran antar kota. Dan secara praktis, Pemerintah Jakarta perlu memperluas jangkauan dan bidang aksi melalui kemitraan internasional khususnya di C40 tidak hanya pada transportasi dan kualitas udara, namun juga melalui pengelolaan air dan tanah, yang saat ini masih menjadi problematika yang serius bagi Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 31–50. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>
- Dermawan, W., Akim, A., & Primawanti, H. (2020). Paradiplomasi Bandung Menuju Kota Wisata Halal. *Indonesian Perspective*, 5(2), 183–200. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.34133>
- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.21456/vol%viss%ipp%p>
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48595>
- Hafizha, A. A., Yanwari, I., Putri, S. S. N., Herwidyanti, M., & Prameswara, D. (2024). Jakarta Sebagai Aktor Paradiplomasi Hijau Pada Masa Pemerintahan Anies Baswedan. *Power in International Relations*, 9(1), 1–18.
- Hakiky, A. (2023). *Peran hubungan masyarakat badan narkotika nasional kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perspektif Siyasa Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/60423/>
- Hutabarat, J. (2017). *Dasar dasar pengetahuan ergonomi*. Media Nusa Creative. <http://eprints.itn.ac.id/3450/>
- Juniarty, S., Asariunnazwa, A. Z., & Rachman, I. F. (2024). Mewujudkan Literasi Digital Pada Generasi Z: Tantangan Dan Peluang Menuju Pendidikan Berkualitas Sdgs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 166–180. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1383>
- Kurniawan, A., Alinda, T., Ramdhani, F., & Alawi, M. (2023). Pendampingan UMKM Kripik Pisang dan Talas melalui Packaging dan Digital Marketing di Kelurahan Rakam, Kabupaten Lombok Timur, NTB. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.34148/komatika.v3i1.620>
- Natswa, S. L. (2021). Studi Literasi: Telaah Risiko Green Investment dan Utilitasnya Terhadap SDGs 2030 Melalui Green Bonds. *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 1(1). <http://conference.um.ac.id/index.php/rpm/article/view/2787>

- Nisa, H. M. (2022). Paradiplomasi Melalui Sister City Pemerintah Kota Denpasar dan Mossel Bay: Implementasi dan Pengalihan Kerja Sama. *Global and Policy Journal of International Relations*, 10(01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v10i01.3569>
- Pasaribu, R. P., Sudarwani, M. M., & Eni, S. P. (2023). Kajian Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Kawasan Pecinan Semarang. *Laporan Hibah Penelitian Perguruan Tinggi*, 1–129. <http://repository.uki.ac.id/13199/>
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (Studi pada SKPD pemerintah provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4117>
- Rosyidah, I. (2017). *Analisis audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah: Studi kasus pada BMT Al Hijrah Kan Jabung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9617/>
- Shinta, S. (2024). Pengaruh Urbanisasi terhadap Perubahan Kondisi Sosial dan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 9(1), 47–55. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v9i1.10068>
- Sirsya, S. S. (2024). *Efektivitas Paradiplomasi Kerjasama Sister City Kota Denpasar dan Kota Mossel Bay Pada Tahun 2019-2023*. UPN Veteran Jawa Timur. <https://repository.upnjatim.ac.id/21892/>
- Suyatna, H., & Nurhasanah, Y. (2017). Sociopreneurship sebagai tren karir anak muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(1), 527–537. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38011>
- Ulum, A. N. (2023). *Politik Hukum Lingkungan Dalam Perubahan Iklim Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27152/>